

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari kegiatan pembangunan. Terutama pembangunan pada sektor konstruksi. Pembangunan pada sektor konstruksi pada zaman sekarang ini sangat meningkat. Kebutuhan pada bangunan-bangunan konstruksi saat ini sudah mendominasi. Kebutuhan akan fasilitas-fasilitas penunjang untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan lainnya sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan kita dapat menjumpai aktivitas pembangunan pada sektor konstruksi di setiap wilayah. Baik itu konstruksi pada jalan, jembatan, gedung, atau pun pada pengelolaan sumber daya air.

Dengan meningkatnya pembangunan, tentunya juga banyak bermunculan kontraktor atau penyedia jasa pada bidang konstruksi. Kontraktor atau penyedia jasa ini tentunya saling berkompetisi untuk memenangkan persaingan dalam bidang konstruksi ini untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pengguna jasa yang salah satu caranya dengan meningkatkan mutu dari jasa yang ditawarkan. Dimana mutu merupakan aspek yang penting yang harus diperhatikan selain biaya dan waktu. Dengan semakin bagusnya mutu, maka semakin bagus pula hasil suatu pekerjaan. Sebagaimana dicantumkan oleh Rivelino dan Soekiman (2016) dalam penelitiannya yang menyebutkan dasar-dasar pengendalian mutu telah digunakan dengan baik oleh

kontraktor ataupun konsultan pengawas pada pembangunan jaringan irigasi DI. Leuwigoong sehingga dapat mengurangi resiko dari kesalahan pada setiap pekerjaan.

Agar tercapainya mutu yang diharapkan, terlebih dahulu dilakukannya penerapan terhadap Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) pada jasa konstruksi yang ditawarkan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ini dimaksudkan agar proyek jasa konstruksi yang dihasilkan dapat sesuai dengan rencana atau sesuai dengan yang diharapkan oleh penerima jasa.

Salah satu penerapan dari Sistem Manajemen Mutu (SMM) ini adalah dengan menyusun suatu dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) pada suatu proyek jasa konstruksi yang disusun oleh pihak kontraktor atau penyedia jasa. Dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM).

Adanya dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) ini, dapat menjadi acuan dalam mengendalikan mutu sehingga dapat meminimalisir adanya kegagalan dalam proyek jasa konstruksi agar didapatkan mutu sesuai dengan rencana. Dalam skripsinya, Ahzan (2014) menyebutkan bahwa konsultan pengawas pada proyek tersebut menggunakan form ceklis yang berbeda dari Instruksi Kerja Pengawasan Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas/mutu dari proyek itu sendiri. Dari pernyataan tersebut, dimana instruksi kerja merupakan bagian dari dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK), yang mengartikan bahwa dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) mampu menjadi acuan bagus tidaknya

pekerjaan di lapangan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul di atas dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui kelengkapan dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa terhadap proyek jasa konstruksi yang dikerjakan dengan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM), maka dilakukan studi kasus pada tiga proyek yang selanjutnya dilakukan analisa perbandingan. Proyek tersebut yaitu :

1. Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Tiku di Kabupaten Agam

Proyek ini dilaksanakan oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk dan PT. Ashfri Putralora, KSO. Memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 900 (sembilan ratus) hari kalender dengan tanggal kontrak 20 Juni 2017. Lokasi proyek ini berada di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

2. Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk ini memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 900 (sembilan ratus) hari kalender dengan tanggal kontrak 26 Juli 2017. Lokasi proyek ini berada di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

3. Proyek Pembangunan Bangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Air Dingin

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Gunakarya Nusantara ini memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 900 (sembilan ratus) hari kalender dengan tanggal kontrak 20 Juni 2017. Lokasi proyek ini berada di Kota Padang.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Membandingkan dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Tiku di Kabupaten Agam, Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh, dan Proyek Pembangunan Bangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Air Dingin dengan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Permen PU.
2. Untuk mengetahui kelengkapan dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Tiku di Kabupaten Agam, Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh, dan Proyek Pembangunan Bangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Air Dingin terhadap Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Permen PU.

Manfaat penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mahasiswa dapat mengetahui penerapan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa

Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Tiku di Kabupaten Agam, Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh, dan Proyek Pembangunan Bangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Air Dingin.

2. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak kontraktor atau penyedia jasa dalam penerapan Rencana Mutu Kontrak (RMK) dan sebagai acuan pada proyek pembangunan berikutnya.

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak terjadinya penelitian yang terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian hanya berkonsentrasi pada kelengkapan dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Tiku di Kabupaten Agam, Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh, dan Proyek Pembangunan Bangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Air Dingin yang dibandingkan dengan dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Permen PU.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dari tugas akhir yang disusun oleh penulis :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan masalah, serta sistematika penulisan dari tugas akhir ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II berisikan teori-teori berhubungan dengan masalah yang menjadi topik pada tugas akhir yang diangkat penulis.

BAB III: METODOLOGI

Pada BAB III ini diuraikan urutan rencana dari kegiatan penelitian yaitu: latar belakang, perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini berisi hasil serta pembahasan dari data-data yang diperoleh dari ketiga Penyedia Jasa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V ini diuraikan kesimpulan dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan juga saran-saran yang diberikan kepada peneliti yang akan melaksanakan penelitian dengan tema yang sama dengan tugas akhir ini.

